

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan sangat mendukung untuk penyediaan berbagai informasi secara efisien dan efektif. Melihat perkembangan teknologi informasi yang dapat memberikan berbagai keuntungan membuat pemerintah mulai serius untuk mengimplementasikannya. Hal ini bisa dilihat dengan diterbitkannya berbagai aturan yang menyangkut dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkungan pemerintahan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga di pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Tidak sedikit organisasi ataupun lembaga pemerintahan melaksanakan pengembangan teknologi informasi hanya berdasarkan dari apa yang mereka percayai atau direkomendasikan oleh kolega atau vendor. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) memerlukan perencanaan yang sangat baik agar bisa mencegah kerugian yang lebih besar dari sisi finansial dan investasi.

Peran dari SI/TI dalam menjalankan kegiatan bisnis suatu organisasi di era informasi saat ini sangatlah dibutuhkan. Hal ini dapat dinyatakan bahwa SI/TI memiliki beberapa peranan penting dalam organisasi, antara lain karena SI/TI merupakan sarana untuk membantu organisasi dalam mewujudkan efisiensi integrasi antara pandangan manajemen dan operasional, meningkatkan kualitas pelayanan bagi konsumen, dan SI/TI juga dapat menjadi dasar untuk membantu

pengambilan keputusan. Selain itu, SI/TI dapat membantu organisasi dalam merencanakan program kerja ke depan atau secara umum dapat dikatakan bahwa SI/TI berfungsi sebagai sarana dalam membantu organisasi dalam merealisasikan tujuan strategisnya.

Organisasi perlu melakukan penggalan kebutuhan bisnis dan mengevaluasi sumber daya SI/TI, sehingga diperoleh peluang yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat di dalam organisasi. Bagi organisasi, memiliki strategi bisnis saja belum cukup untuk menghadapi persaingan di antara organisasi. Strategi bisnis yang dituangkan dalam rencana bisnis harus dilengkapi dengan strategi SI/TI. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan secara optimal penggunaan SI/TI sebagai komponen utama SI/TI di organisasi.

Strategi SI/TI di lingkungan pemerintahan saat ini mengarah pada pemanfaatan SI/TI sebagai penggerak bisnis utama di dalam aktivitas pengelolaan dan penyelenggaraan program pembangunan daerah. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pemerintahan berbasis elektronik atau e-government adalah dengan memanfaatkan sistem informasi (SI) dan teknologi informasi (TI) secara optimal. Pemanfaatan teknologi secara baik dan benar diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai yang optimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang dilayaninya.

Adanya kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) no.3/2003 tentang "Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government", dan Undang-Undang No. 22/1999 yang diperbaharui menjadi UU No. 32/2004 tentang

Pemerintah Daerah, turut memacu perkembangan e-Government di Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan peluang yang sangat luas bagi daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng perlu lebih bekerja keras untuk mendukung misi utama e-Government dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melangsungkan perencanaannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022. Visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 yang disampaikan kepada rakyat Buleleng pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Jadi visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng 2017-2022 adalah visi dan misi pilihan rakyat Buleleng. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng terpilih tahun 2017-2022 juga merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012-2017. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2012-2017.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022 yang menjadi visi RPJMD adalah: “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana.” Visi itu bermakna sebagai berikut.

1. Mandiri mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Sejahtera mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. Berdaya Saing mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. Berlandaskan *Tri Hita Karana* mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Strategi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng diharapkan dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi pembangunan yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah diperjelas dengan arah kebijakan untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan agar memiliki fokus dan target dalam pelaksanaannya lima tahun ke depan.

Penetapan isu strategis daerah untuk menjadi prioritas penanganan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan mempertimbangkan kondisi dan dinamika yang terjadi pada lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana tata ruang wilayah.

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat pada masa mendatang. Ada 7 (tujuh) kriteria yang digunakan untuk memilih isu strategis, yaitu: bersifat lintas sektor, bersifat lintas wilayah, dapat berupa fenomena atau persoalan nyata, berdampak negatif jangka panjang jika tidak diselesaikan, berpotensi mengganggu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, potensi dampaknya kumulatif dan berefek ganda, dan potensi dampaknya lebih luas dari wilayah perencanaan. Di samping itu, kondisi lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional, provinsi, rencana tata ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana diuraikan di atas, merupakan referensi untuk memperkaya perumusan isu strategis Kabupaten Buleleng.

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai referensi dan menetapkan kriteria seperti disebutkan di atas, visi misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih telah merumuskan isu-isu strategis yang menjadi tantangan pokok Kabupaten Buleleng lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Penyediaan sarana dan prasarana publik, seperti infrastruktur jalan, air minum, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Pelayanan pendidikan dan kesehatan termasuk penanganan HIV/AIDS dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat belum optimal;
2. Iklim investasi, peningkatan peluang investasi, peningkatan peluang berusaha, dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Buleleng belum optimal;
3. Integrasi program pengentasan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat belum optimal;
4. Peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, termasuk revitalisasi pertanian dalam arti luas belum berjalan simultan dan berkelanjutan;
5. Kemandirian fiskal daerah, terutama tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal, efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan belum diterapkan secara optimal, yang tercermin pada kualitas lingkungan hidup yang belum baik, tata kelola dan pengendalian pemanfaatan tata ruang belum optimal, penegakan hukum belum berjalan secara konsisten, dan pelestarian seni dan budaya lokal terutama di kalangan generasi muda belum optimal.

Kondisi yang ada pada saat ini pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam pemanfaatan SI dan TI adalah masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga dimana vendor dari pihak ketiga ini memiliki program dan struktur data yang bervariasi sehingga sulit untuk diintegrasikan. Selain itu, ruang server dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan server sangat tinggi jika diakumulasikan. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah belum adanya kesamaan data sehingga *hacker* sangat mudah apabila ingin mengacaukan sistem informasi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Buleleng. Juga, belum optimalnya penerapan domain pada sistem informasi berbasis web. Sumber daya manusia untuk menangani permasalahan pada sistem informasi dan teknologi informasi masih kurang memadai sehingga masih tergantung pada pihak ketiga. Dan, tidak adanya evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi dari perangkat daerah yang menangani hal tersebut.

Proses perubahan sangat diperlukan untuk mencapai standar pengembangan dan penerapan TI guna mencapai keunggulan kompetitif tersebut. Pemerintah Daerah perlu merencanakan suatu perencanaan arsitektur TI strategis yang komprehensif dan terukur agar nantinya pelaksanaan implementasi *e-government* dapat sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Pada tesis ini, peneliti mencoba untuk menganalisis pokok-pokok bahasan tersebut dan hasilnya ditujukan untuk membuat perencanaan model arsitektur bisnis, informasi dan teknologi, dengan menggunakan model perencanaan versi Ward and Peppard.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pihak ketiga dimana vendor dari pihak ketiga ini memiliki program dan struktur data yang bervariasi sehingga sulit untuk diintegrasikan.
2. Ruang server dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah sehingga anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan server sangat tinggi jika diakumulasikan.
3. Belum adanya keamanan data sehingga *hacker* sangat mudah apabila ingin mengacaukan sistem informasi yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Belum optimalnya penerapan domain pada sistem informasi berbasis web.
5. Sumber daya manusia untuk menangani permasalahan pada sistem informasi dan teknologi informasi masih kurang memadai sehingga masih tergantung pada pihak ketiga.
6. Tidak adanya evaluasi sistem informasi dan teknologi informasi dari perangkat daerah yang menangani hal tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembahasan masalah pada penelitian ini disajikan seperti beberapa pembatasan berikut.

1. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Buleleng yang mencakup satuan kerja yang ada seperti Sekretariat Daerah, Badan, dan Dinas.

2. Pembahasan lebih difokuskan pada perencanaan SI/TI untuk proses bisnis yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Perencanaan strategis dibuat dan dikembangkan dari SI/TI yang ada pada saat penelitian dilakukan agar sesuai dengan arah perkembangan organisasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada identifikasi masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi SI/TI dan kondisi lingkungan bisnis yang sedang dijalankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana rencana strategi SI/TI menggunakan *framework* Ward and Peppard untuk menunjang proses bisnis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan kondisi SI/TI dan kondisi lingkungan bisnis yang sedang dijalankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Untuk merumuskan rencana strategi SI/TI menggunakan *framework Ward and Peppard* untuk menunjang proses bisnis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan referensi yang dapat memperkaya wawasan di bidang perencanaan strategis SI/TI khususnya dalam bidang pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat memberikan masukan dalam perumusan strategis SI/TI yang selaras dengan strategis bisnis yang akan dijalankan.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman serta menerapkan ilmu yang sudah didapat dari materi kuliah.
- c. Bagi masyarakat luas dapat menambah khasanah keilmuan seputar IT dan perkembangannya.

